

# KETIMPANGAN PENGELUARAN DAN POLA KONSUMSI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

Ukuran Buku : 14,8 cm X 21 cm Jumlah Halaman : 64 + viii halaman

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga penerbitan buku Ketimpangan Pengeluaran dan Pola Konsumsi Kabupaten Sleman Tahun 2023 ini dapat terwujud. Pembahasan dalam buku ini antara lain yaitu distribusi dan ketimpangan pengeluaran, penduduk miskin, dan gambaran umum pola konsumsi di Kabupaten Sleman.

Indeks Gini Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar 0,433 sehingga termasuk kategori ketimpangan moderat. Sedangkan berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sleman termasuk sedang, dimana kelompok penduduk 40% pendapatan rendah berkisar 15,96% dari total pendapatan penduduk Kabupaten Sleman. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman jumlah penduduk miskin Kabupaten Sleman pada tahun 2023 mengalami penurunan

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku Ketimpangan Pengeluaran dan Pola Konsumsi Kabupaten Sleman Tahun 2023, khususnya kepada BPS Kabupaten Sleman yang bertindak sebagai narasumber. Diharapkan para pengguna data dan pemangku kebijakan dapat memanfaatkannya secara optimal.

> Sleman, Mei 2024 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

> > ttd

EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si., M.Kom Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19680330 199803 1 009

## **DAFTAR ISI**

Daftar Isi       iv         Daftar Tabel       vi         BAB I. Pendahuluan       2         1.1. Latar Belakang       2         1.2. Maksud dan Tujuan       4         1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan       4         BAB II. Kajian Literatur       8         2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       8         2.2. Definisi Pembangunan       9         2.3. Distribusi Pendapatan       10         2.4. Konsep Kesenjangan       10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
Daftar Gambar       vii         BAB I. Pendahuluan       2         1.1. Latar Belakang       2         1.2. Maksud dan Tujuan       4         1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan       4         BAB II. Kajian Literatur       8         2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       8         2.2. Definisi Pembangunan       9         2.3. Distribusi Pendapatan       10         2.4. Konsep Kesenjangan       10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24   ្>
BAB I. Pendahuluan       2         1.1. Latar Belakang       2         1.2. Maksud dan Tujuan       4         1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan       4         BAB II. Kajian Literatur       8         2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       8         2.2. Definisi Pembangunan       9         2.3. Distribusi Pendapatan       10         2.4. Konsep Kesenjangan       10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
1.1. Latar Belakang       2         1.2. Maksud dan Tujuan       4         1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan       4         BAB II. Kajian Literatur       8         2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       8         2.2. Definisi Pembangunan       9         2.3. Distribusi Pendapatan       10         2.4. Konsep Kesenjangan       10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
1.2. Maksud dan Tujuan       .4         1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan       .4         BAB II. Kajian Literatur       .8         2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       .8         2.2. Definisi Pembangunan       .9         2.3. Distribusi Pendapatan       .10         2.4. Konsep Kesenjangan       .10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       .12         2.5.1. Indeks Gini       .13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       .14         2.6. Kemiskinan       .16         BAB III. Penjelasan Teknis       .22         3.1. Ruang Lingkup       .22         3.2. Desain Sampel       .23         3.3. Metode Pengumpulan Data       .23         3.4. Pengolahan       .23         3.5. Blok Sensus       .24
1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan       .4         BAB II. Kajian Literatur       .8         2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       .8         2.2. Definisi Pembangunan       .9         2.3. Distribusi Pendapatan       .10         2.4. Konsep Kesenjangan       .10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       .12         2.5.1. Indeks Gini       .13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       .14         2.6. Kemiskinan       .16         BAB III. Penjelasan Teknis       .22         3.1. Ruang Lingkup       .22         3.2. Desain Sampel       .23         3.3. Metode Pengumpulan Data       .23         3.4. Pengolahan       .23         3.5. Blok Sensus       .24
BAB II. Kajian Literatur       8         2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       8         2.2. Definisi Pembangunan       9         2.3. Distribusi Pendapatan       10         2.4. Konsep Kesenjangan       10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
BAB II. Kajian Literatur       8         2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       8         2.2. Definisi Pembangunan       9         2.3. Distribusi Pendapatan       10         2.4. Konsep Kesenjangan       10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi       .8         2.2. Definisi Pembangunan       .9         2.3. Distribusi Pendapatan       .10         2.4. Konsep Kesenjangan       .10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       .12         2.5.1. Indeks Gini       .13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       .14         2.6. Kemiskinan       .16         BAB III. Penjelasan Teknis       .22         3.1. Ruang Lingkup       .22         3.2. Desain Sampel       .23         3.3. Metode Pengumpulan Data       .23         3.4. Pengolahan       .23         3.5. Blok Sensus       .24
2.3. Distribusi Pendapatan       10         2.4. Konsep Kesenjangan       10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
2.4. Konsep Kesenjangan       10         2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan       12         2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
2.5.1. Indeks Gini       13         2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia       14         2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
2.6. Kemiskinan       16         BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
BAB III. Penjelasan Teknis       22         3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
3.1. Ruang Lingkup       22         3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
3.2. Desain Sampel       23         3.3. Metode Pengumpulan Data       23         3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
3.3. Metode Pengumpulan Data233.4. Pengolahan233.5. Blok Sensus24
3.4. Pengolahan       23         3.5. Blok Sensus       24
3.5. Blok Sensus
3.6. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga24
3.7. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan26
BAB IV. Pembahasan28
4.1. Ketimpangan Pendapatan28
4.1.1. Indeks Gini29
4.1.2. Ketimpangan Kriteria Bank Dunia31
4.2. Kemiskinan

4.2.1. Garis Kemiskinan	33
4.2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	36
4.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	39
4.2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan	40
4.3. Pola Konsumsi	42
4.3.1. Pola Konsumsi Kelompok Makanan	48
4.3.2. Pola Konsumsi Kelompok Non Makanan	54
BAB V.Penutup	62

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1.	Indeks Gini dan Kriteria Tingkat Ketimpangan di		
	Kabupaten Sleman, 2019-2023	30	
Tabel 4.2.	Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia		
	di Kabupaten Sleman, 2019-2023	32	
Tabel 4.3.	Garis Kemiskinan Kabupaten Sleman 2019-2023	34	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut
	Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta 2010
	2023 (Rp/kapita/bulan)
Gambar 4.2.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten
	Sleman 2018-2023
Gambar 4.3.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut
	Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta 2010
	2023 (ribu jiwa)
Gambar 4.4.	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut
	Kebupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta 2010-
	202338
Gambar 4.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
	Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta
	2010-202339
Gambar 4.6.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
	Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta
	2010-202341
Gambar 4.7.	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
	Kabupaten Sleman 2017-202343
Gambar 4.8	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut
	Kelompok Pengeluaran Kabupaten Sleman 2017-
	202344
Gambar 4.9	Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut
	Kelompok Pengeluaran Kabupaten Sleman 2017-
	202345
Gambar 4.10.	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut
	Kuintil Pengeluaran Kabupaten Sleman Tahun 202346
Gambar 4.11.	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut
	Sub Kelompok Makanan Kabupaten Sleman 2017-
	2023

Gambar 4.12.	. Rata-rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Per Bular		
	Kabupaten Sleman 2019-2023	.48	
Gambar 4.13.	Proporsi Pengeluaran untuk Makanan Kabupaten		
	Sleman 2019-2023	.49	
Gambar 4.14.	Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Per		
	Bulan Menurut Sub Kelompok Makanan Kabupaten		
	Sleman 2019-2023	.50	
Gambar 4.15.	Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Per		
	Bulan Menurut Sub Kelompok Makanan Per Kuantil		
	Kabupaten Sleman 2019-2023	.51	
Gambar 4.16.	Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Per		
	Bulan Kabupaten Sleman 2019-2023	.50	
Gambar 4.17.	Persentase Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Per	r	
	Bulan Menurut Sub Kelompok Non Makanan		
	Kabupaten Sleman 2019-2023	.55	
Gambar 4.18.	Persentase Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Per	r	
	Bulan Menurut Sub Kelompok Non Makanan Per		
	Kuantil Kahunaten Sleman 2019-2023	52	



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu sasaran utama bagi setiap daerah yang sedang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan penjumlahan dari seluruh nilai output yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB memiliki peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang.

Pembangunan yang telah dilaksanakan sejauh ini mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perekonomian di suatu daerah. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah apakah dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam beberapa kondisi laju pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi kesenjangan (disparitas). Secara umum kesenjangan yang terjadi meliputi kesenjangan pendapatan yang menimbulkan jurang perbedaan (gap) antara orang kaya dan miskin, dan kesenjangan antar daerah. Kesenjangan antar daerah dapat terjadi karena adanya perbedaan kondisi geografi dan sumber daya alam pada setiap daerah.

Kesenjangan pendapatan atau tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan permasalahan yang sering dihadapi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tidak meratanya distribusi pendapatan ini memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal munculnya masalah kemiskinan. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin lebar kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Bila kondisi seperti ini terjadi di suatu daerah, berarti pembangunan yang dilaksanakan lebih berpihak kepada

Pada pilar pembangunan ekonomi tujuan ke-10 SDGs disebutkan mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Salah satu indikator yang digunakan adalah koefisien gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan (kesenjangan ekonomi) dan tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar. Apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi sosial yang dampaknya cukup negatif. Pembangunan yang dilakukan diharapkan tidak hanya untuk mencapai target tingkat pertumbuhan, akan tetapi juga menghasilkan pemerataan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penulisan publikasi ini adalah:

- Untuk menyajikan distribusi dan ketimpangan pengeluaran tahun
   2019 2023;
- Untuk menyajikan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Sleman tahun 2019-2023 menurut berbagai indikator;
- c. Untuk menyajikan gambaran umum pola konsumsi di Kabupaten Sleman.

## 1.3. Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup publikasi ini mencakup gambaran kondisi distribusi dan ketimpangan pengeluaran penduduk, kemiskinan penduduk, dan gambaran umum pola konsumsi penduduk di Kabupaten Sleman. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Susenas tahun 2019-2023.

[Halaman ini dikosongkan]



# 2 KAJUANJIJFRAJJUR.





#### BAB II

#### **KAJIAN LITERATUR**

Menurut Todaro dan Smith (2003), menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk miskin, dan pengangguran merupakan indikator keberhasilan pembangunan dari suatu daerah. Ketimpangan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai pembangunan, karena kesenjangan sering dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Hubungan antara tingkat distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan ekonomi berbentuk seperti U-terbalik Kuznets (1995). Artinya, pada awal perkembangan ekonomi, distribusi pendapatan akan menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi, tetapi seiring dengan semakin matangnya sebuah perekonomian, kesenjangan pendapatan tersebut akan menurun perlahan setelah melewati titik puncak.

#### 2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Mankiw (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Selanjutnya ditambahkan oleh Mankiw (2003) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) bukan indikator lainnya di antaranya

adalah bahwa PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

## 2.2. Definisi Pembangunan

Definisi pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Menurut Kartasasmita (1994) pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Sukirno (1995), pembangunan adalah suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Menurut Todaro dan Smith (2006) pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesenjangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan

keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik secara material maupun spiritual.

#### 2.3. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999). Distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau ne

how benefit of economy is distributed among people or region inequality is

about the disparities in levels of living

Kesenjangan relatif tergantung dari rasio pendapatan individu terhadap rata-rata pendapatan secara keseluruhan. Sehingga, jika semua pendapatan naik dengan tingkat yang sama, maka kesenjangan relatif menjadi tidak berubah. Kesenjangan absolut merupakan pengukuran kesenjangan dengan menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak

Dalam melakukan analisa kesenjangan, kita memerlukan suatu ukuran yang dapat menangkap pola distribusi pendapatan, kemudian menghasilkan angka yang dapat diinterpretasikan dan diperbandingkan, baik antar waktu maupun antar sub-sample dan sample, selain juga mampu menunjukkan derajat kesenjangan (Hindriks dan Myles, 2006). Masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu:

- a. Distribusi pendapatan antar golongan pendapatan (size disfribution of lncome) atau kesenjangan relatif
- b. Distribusi pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan (urban- rural lncome disparities)
- Distribusi pendapatan antar daerah (regional income disparity) C.

## 2.5. Ukuran Tingkat Kesenjangan

Di dalam melakukan analisa kesenjangan di suatu wilayah, kita memerlukan alat atau ukuran-ukuran yang dapat menimbang tingkat kesenjangan di suatu wilayah. Ada beberapa indeks yang diciptakan untuk mengukur kesenjangan di suatu wilayah, diantaranya Indeks Williamson, Atkinson, Koefisien Gini, Theil Indeks dan lainlain, bahkan Bank Dunia menciptakan kriteria umum untuk membandingkan tingkat kesenjangan. Pada publikasi ini, digunakan Indeks Gini dan Bank Dunia sebagai ukuran kesenjangan yang paling umum dipakai.

Dalam melakukan analisis distribusi pendapatan, saat memilih ukuran kesenjangan, kita mengharapkan ukuran tersebut merupakan ukuran distribusi rumah tangga dalam ukuran tunggal. Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti :

- a. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean Independence*), artinya jika semua pendapatan bertambah secara proporsional, maka ukuran ketimpangan tidak akan berubah.
- b. Dapat diperbandingkan.
  Suatu ukuran distribusi pendapatan diharapkan dapat memberikan suatu angka ukura kesenjangan yang dapat diperbandingkan, baik di dalam suatu daerah, interregional maupun secara intertemporal.
- c. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton.Suatu ukuran distribusi pendapatan diharapkan dapat menangkap

perubahan distribusi pendapatan ketika terjadi mekanisme transfer pendapatan dari rumah tangga berpendapatan tinggi ke rumah tangga dengan pendapatan lebih rendah, walaupun total pendapatan masyarakat secara agregat tidak berubah (Sensitif terhadap transfer pendapatan).

- d. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*), artinya jika penduduk berubah dan kondisi lain tetap (cateris Paribus), maka ukuran ketimpangan tidak berubah.
- e. Simetris.

Jika antar populasi bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran kesenjangan.

Dilihat dari kriteria-kriteria yang harus dimiliki indeks, Indeks Gini memenuhi kriteria-kriteria sebagai indeks yang mengukur kesenjangan pendapatan di suatu daerah.

#### 2.5.1. Indeks Gini

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Indeks Gini. Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Indeks Gini. Ide dasar penghitungan Indeks Gini sebenarnya berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva (yang kemudian dinamakan Kurva Lorenz) yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pengeluaran. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Jika nilai Indeks Gini semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat

ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Menurut Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 termasuk dalam kategori ketimpangan yang rendah
- Nilai Indeks Gini antara 0,3 hingga 0,5 termasuk dalam kategori moderat,
- Nilai Indeks Gini lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan tinggi.

## 2.5.2. Ketimpangan Relatif Kriteria Bank Dunia

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil penghitungan Indeks Gini barulah menggambarkan tingkat pemerataan pendapatan secara global. Sejauh mana atau berapa bagian yang diterima oleh kelompok berpendapatan terendah/miskin belum nampak jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga Studi Pembangunan Universitas Sussex mengembangkan suatu ukuran yang dapat memberikan gambaran lebih ielas mengenai masalah ketimpangan (*Inequality*) melalui indikator yang disebut ketimpangan relatif (Relative inequality) Kriteria Bank Dunia. Ketimpangan relatif

diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat.

Bank Dunia mengelompokkan penduduk pada tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yaitu:

- a. Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah
- b. Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah
- c. Kelompok 20 persen penduduk yang berpendapatan tinggi Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, indikator kesenjangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase pendapatan penduduk dari 40 persen dari penduduk yang berpendapatan terendah dibandingkan dengan total pendapatan seluruh penduduk. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan menjadi:
- a. Tingkat ketimpangan tinggi (*Height Inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen.
- b. Tingkat ketimpangan sedang (*Moderat Inequality*), bila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen.
- c. Tingkat ketimpangan rendah (*Low Inequality*), bila proporsi pendapatan dari penduduk yang masuk kategori

40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di atas, dapat dilihat bahwa pendapatan yang diterima oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah (40 persen penduduk berpenghasilan menengah) dan atas (20 persen penduduk berpenghasilan tinggi) tidaklah diperhatikan. Seandainya ada perubahan penerimaan pendapatan pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah dan atas, tidak akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia ini.

#### 2.6. Kemiskinan

Mengenai definisi kemiskinan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Todaro dan Smith (2007) menyatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut (Todaro dan Smith, 2007). Kemiskinan menurut World Bank (2000)

poverty is pronounced deprivation in well-being bermakna bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan.

Sedangkan permasalahan inti pada kemiskinan ini adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup,

kemiskinan. Selanjutnya Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif, kemiskinan absolut dan kemiskinan struktural.

a. Kemiskinan relatif; kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan

## 2015).

b. Kemiskinan Absolut; kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan

Pada saat itu, penghitungan mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian baru sejak tahun 2003, BPS dapat menyajikan data jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin setiap tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan menggunakan data SUSENAS, di mana jumlah komponen kebutuhan dasar terdiri atas 52 jenis komoditi makanan dan 51 komoditi bukan makanan di daerah perkotaan dan 47 komoditi di daerah perdesaan.

Kriteria kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar selalu digunakan BPS untuk menghitung kemiskinan makro yang di release setiap tahunnya. Secara operasional penduduk miskin merupakan merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis kemiskinan (BPS, 2012). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah Garis Kemiskinan (GK) tergolong penduduk miskin.

# 3 PENJELASAN TEKNIS

#### **RARIII**

#### PENJELASAN TEKNIS

#### **Ruang Lingkup** 3.1.

Susenas Maret 2023 mencakup 345.000 rumah tangga sampel yang tersebar pada 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Response rate Susenas Maret 2023 adalah sebesar 99,25 persen atau 342.412 rumah tangga. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan konsistensi data, jumlah sampel yang dinyatakan clean sebanyak 341.802 rumah tangga. Dengan jumlah sampel tersebut, estimasi data hasil Susenas Maret 2023 dapat dilakukan hingga level kabupaten/kota. Di Kabupaten Sleman Susenas Maret 2023 mencakup 960 rumah tangga sampel yang tersebar pada 96 blok sensus di wilayah Kabupaten Sleman dengan respon rate mencapai 97,08 persen.

Seluruh rumah tangga sampel ditanyakan baik untuk makanan maupun bukan makanan. Untuk komoditi makanan, ditanyakan mengenai apa yang dikonsumsi oleh seluruh anggota rumah tangga selama seminggu terakhir, baik kuantitas maupun uang yang dikeluarkan untuk makanan yang dikonsumsi tersebut. Untuk komoditi bukan makanan, rumah tangga juga ditanyakan mengenai besarnya uang yang dikeluarkan untuk barang-barang selain makanan selama sebulan atau setahun terakhir.

#### 3.2. Desain Sampel

Rancangan sampel Susenas Maret 2023 adalah paket sampel untuk mendapatkan data yang representative sampai dengan Kabupaten/Kota. Pencacahan dilaksanakan bulan Maret, dengan total sampel secara nasional 345.000 rumah tangga dari 34.500 BS. Pemilihan sampel dilakukan secara sistematik sehingga komposisi BS terpilih per strata sebanding dengan komposisi BS berdasarkan stratifikasi disetiap kabupaten/kota.

#### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari rumah tangga terpilih dilakukan dengan cara wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau ART yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

## 3.4. Pengolahan

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan. Proses pengolahan dimulai di BPS Kabupaten/Kota dengan kegiatan receiving/batching, editing/coding, entri data, dan validasi sederhana. Setelah terbentuk *raw* data, di BPS provinsi dilakukan kegiatan validasi sederhana. Tahap terakhir dari proses pengolahan dilakukan di BPS Pusat, yaitu proses validasi lengkap untuk menghasilkan data yang bersih (clean data).)

#### 3.5. Blok Sensus

Blok sensus (BS) merupakan wilayah kerja dari seorang petugas lapangan pada Susenas Maret 2023. Blok sensus terpilih sudah ditentukan oleh BPS dan terdaftar pada Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS). BS harus mempunyai batas-batas yang jelas/ mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seperti RT, RW, dusun, lingkungan, dsb) diutamakan sebagai batas BS bila batas SLS tersebut jelas.

#### 3.6. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga

Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus.

- a. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami seluruh atau sebagian bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Ada bermacam-macam bentuk rumah tangga biasa, di antaranya:
  - 1) Orang yang tinggal bersama istri dan anaknya;
  - 2) Orang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus, tetapi makannya diurus sendiri;
  - 3) Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus, tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam blok sensus yang sama, maka dianggap sebagai satu rumah tangga;
  - 4) Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang;

- 5) Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak, istri serta anggota rumah tangga lainnya, makan dari satu dapur yang terpisah dari lembaga yang diurusnya;
- Beberapa orang yang bersama-sama menyewa kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri.
- b. Rumah tangga khusus adalah (i) orangorang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh suatu yaya.19 Tm p5 TJET **Q**000006251 0 419.52 595.32 reW\*n

#### Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan 3.7.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga terhadap jumlah penduduk (baik mengonsumsi maupun tidak).

Kuintil pengeluaran adalah pengelompokan pengeluaran ke dalam lima kelompok yang sama besar setelah diurutkan mulai pengeluaran yang terkecil (kuintil 1) hingga terbesar (kuintil 5). Semakin tinggi kuintil pengeluaran menunjukkan semakin sejahtera.





Indeks Gini Kabe Sheman 2021 2022 ..., 425 0,418 0,420 0,433 2020 2023

#### RAR IV

## **PEMBAHASAN**

# 4.1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan permasalahan yang sering dihadapi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan atau tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal munculnya masalah kemiskinan. Menurut Smith dan Todaro (2006), ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Sedangkan menurut Dumairy (1999), distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya.

Kesenjangan merupakan topik bahasan yang seakan tidak pernah lekang dari perhatian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Selain tingkat pertumbuhan ekonomi, kesenjangan sering dijadikan patokan ukuran pembangunan karena dapat memberikan alternatif pengukuran tingkat pendapatan secara relatif antar kelas pendapatan penduduk kaya dan penduduk miskin di suatu wilayah dan mengukur perbandingan relatif antar dua kelompok masyarakat tersebut. Distribusi pendapatan suatu daerah dapat menentukan bagaimana pendapatan daerah yang tinggi mampu menciptakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan,

pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum, tetapi hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah koefisien Gini (Indeks gini) dan Kriteria Bank Dunia.

#### 4.1.1. Indeks Gini

Parameter yang sering digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan ini adalah Angka Gini Rasio yang juga sering disebut Indeks Gini. Indeks Gini/Gini Rasio merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur kesenjangan pendapatan. Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna). Walaupun demikian, menurut Michael Todaro seorang ahli ekonomi pembangunan dari Italia menyebutkan bahwa:

- Gini Ratio terletak antara 0,50 0,70 a. menandakan pemerataan sangat timpang.
- h. Sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36 0,49 menunjukan kesenjangan sedang.

Sementara apabila terletak diantara 0,20 0,35 dinyatakan c. pemerataan relatif tinggi (merata).

Tabel

# 4.1.2. Ketimpangan Kriteria Bank Dunia

Ukuran kesenjangan pendapatan kriteria Bank Dunia merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan dengan memfokuskan pada berapa besar persentase yang diterima oleh 40 persen kelompok penduduk dengan penghasilan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Indikator ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah;
- h. Kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah;
- Kelompok 20 persen penduduk yang berpendapatan tinggi. c. Selanjutnya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut Bank Dunia terpusat pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok tersebut lebih kecil dari 12 persen, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan tergolong tinggi.
- h. Bila kelompok tersebut menerima 12 sampai 17 persen dari total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan **sedang**.
- Bila kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari C. total pendapatan, berarti tingkat ketimpangan sebaran pendapatan rendah.

Tabel 4.2. Ketimpangan Pendapatan Menurut Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Sleman, 2019

Walananah Dandadah	Persentase Pendapatan					
Kelompok Penduduk	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
40% pendapatan terendah	15,51	15,22	15,82	16,07	15,96	
40% pendapatan menengah	36,91	36,99	34,81	32,32	32,36	
20% pendapatan tertinggi	47,58	47,79	49,37	51,61	51,68	
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: Susenas 2019 - 2023, diolah

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan terendah tahun 2023 di Kabupaten Sleman, yaitu berkisar 15,96 persen. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan penduduk dalam kelompok ini persentasenya tergolong sedang atau menengah. Kategori ketimpangan sedang ini masih sama dengan kondisi lima tahun terakhir.

Kondisi yang tergambar dari tabel 4.2, ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia pada tahun 2023 di Kabupaten Sleman menunjukkan porsi pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah turun dan porsi pendapatan kelompok penduduk berpenghasilan menengah dan tinggi juga naik dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 4.2. Kemiskinan

Kemiskinan selalu dikaitkan dengan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi dan kalori serta pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan informasi mengenai pola konsumsi masyarakat. Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Menurut Engel (1857), seiring meningkatnya pendapatan persentase pengeluaran untuk makanan menurun. Hal ini berarti jika pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan semakin kecil, tingkat kesejahteraan penduduk menjadi semakin baik. Oleh karena itu, pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan erat kaitannya dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di beberapa wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan gizi.

#### 4.2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan garis batas yang membedakan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. Pada periode Maret 2019 - Maret 2023, garis kemiskinan di Kabupaten Sleman meningkat dari Rp 382.868,- menjadi Rp 491.652,perkapita per bulan atau naik sebesar 22,13 persen dibandingkan tahun 2019 (Tabel 4.3).

Tabel 4.3 Garis Kemiskinan Kabupaten Sleman 2019 2023

Tahun	Tahun Garis kemiskinan (Rp/kapita/bulan)					
(1)	(2)					
2019	382.868					
2020	411.610					
2021	422.933					
2022	450.763					
2023	491.652					

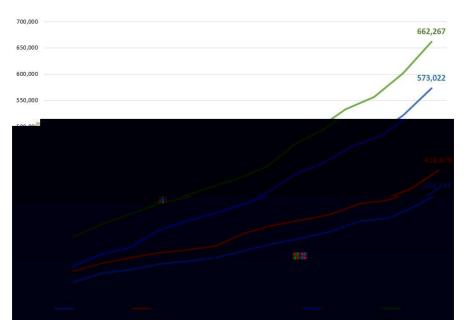
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tren garis kemiskinan seluruh kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi D.I.Yogyakarta, Garis Kemiskinan di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun relatif di atas Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, namun selalu di bawah Garis Kemiskinan Kota Yogyakarta. Dari tahun

2010 sampai dengan tahun 2023 pog ((B)4(2 .Tm0 g0 G[)]TJET@Opan A

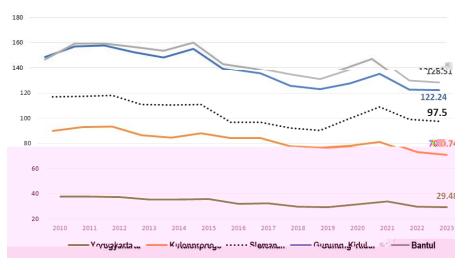
laju inflasi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga-harga komoditas di suatu wilayah.

Gambar 4.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta 2010 2023 (Rp/kapita/bulan)



Jika dilihat secara jumlah, pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman berada di atas Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, namun berada di bawah Kabupaten Gunungkidul, dan Bantul (Gambar 4.3).

Gambar 4.3. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta 2010 (Ribu Jiwa)

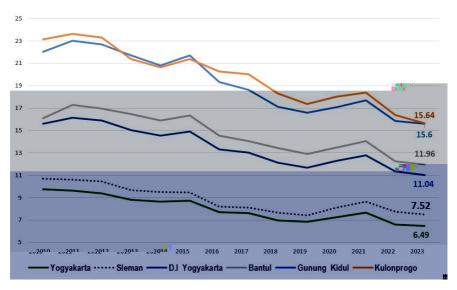


Sumber: BPS, diolah

Jika dilihat persentase penduduk miskin, pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman berada di bawah Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul, namun masih di atas Kota

# Yogyakarta (Gambar 4.4).

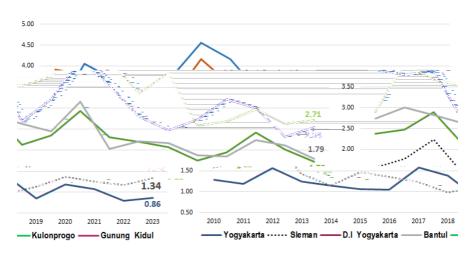
Gambar 4.4. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta 2010 2023



## 4.2.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty gap index ( $P_1$ ) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai  $P_1$ , semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan di suatu daerah.

Gambar 4.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta 2010 2023



Sumber: BPS, diolah

Nilai P<sub>1</sub> Kabupaten Sleman pada tahun 2023 menunjukkan angka 1,34, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 1,18. Kenaikan nilai indeks kedalaman kemiskinan tersebut merupakan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sleman cenderung makin

menjauhi garis kemiskinan. Artinya bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sleman dengan garis kemiskinan semakin melebar.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2010-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Sleman berada di bawah Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul, namun masih di atas Kota Yogyakarta (Gambar 4.5). Selain indeks kedalaman kemiskinan, indikator lain yang perlu dilihat adalah Indeks Keparahan kemiskinan. Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga dapat mengurangi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan.

# 4.2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan

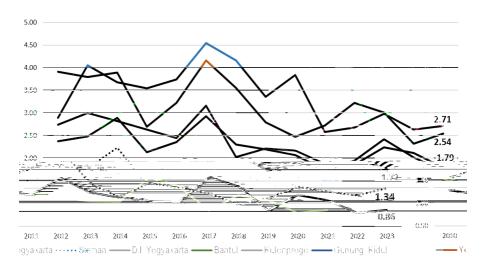
Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty severity index (P2) merupakan ukuran yang menggambarkan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P<sub>2</sub>, semakin besar ketimpangan antarpenduduk miskin atau semakin tidak homogen pengeluaran penduduk miskin di suatu daerah.

Nilai P<sub>2</sub> Kabupaten Sleman mencapai 0,34 pada tahun 2023, naik dibandingkan dengan tahun 2022 (yaitu sebesar 0,27). Peningkatan nilai indeks keparahan kemiskinan tersebut merupakan indikasi bahwa semakin heterogen atau pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Sleman semakin timpang.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi

D.I.Yogyakarta, tahun 2010-2023 nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sleman berada di bawah Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul, namun masih di atas Kota Yogyakarta (Gambar 4.6).

Gambar 4.6. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta 2010

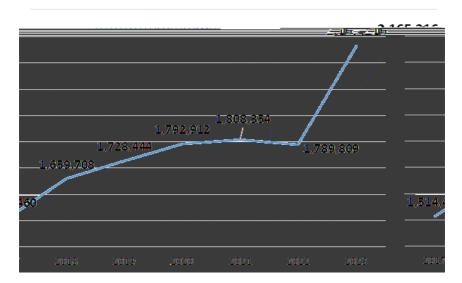


#### 4.3. Pola Konsumsi

Rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi non makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun non makanan kemudian dikonversi ke rata-rata pengeluaran sebulan. Ratarata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan. Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga.

Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh konsumsi rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Menurut Engel (1857) bahwa bila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera apabila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Gambar 4.7. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Kabupaten Sleman 2019 2023 (Rupiah)



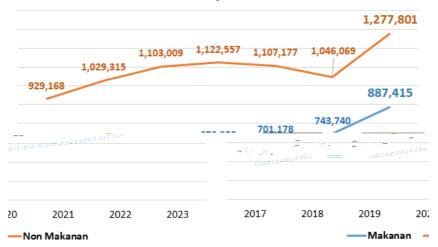
Sumber: BPS, diolah

Gambar 4.7 di atas menunjukkan perkembangan rata-rata pengeluaran penduduk per kapita per bulan di Kabupaten Sleman dari tahun 2017 sampai dengan 2023. Setelah sempat stagnan pada masa pandemi (2020-2022), pengeluaran per kapita penduduk Sleman naik cukup signifikan pada tahun 2023, yaitu mencapai Rp 2.165.216 per kapita per bulan.

Kenaikan pengeluaran yang cukup signifikan pada tahun 2023 terjadi pada kelompok pengeluaran makanan maupun non makanan. Kenaikan pengeluaran non makanan lebih tajam dibanding kenaikan pengeluaran kelompok makanan. Pengeluaran kelompok non makanan dari Rp1.046.069 per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi

Rp1.277.801 pada tahun 2023. Sedangkan pengeluaran kelompok makanan naik dari Rp743.740 per kapita per bulan pada tahun 2022 menjadi Rp887.415 pada tahun 2023

Gambar 4.8. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Sleman 2019 2023 (Rupiah)



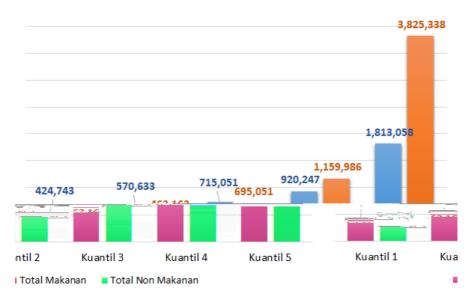
Gambar 4.9. Proporsi Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Sleman 2017 2023



Sumber: BPS, diolah

Jika dilihat secara proporsi kenaikan yang tajam pengeluaran non makanan pada tahun 2023 tidak membuat proporsi nya naik tajam dibanding dengan pengeluaran kelompok makanan. Pada tahun 2023 proporsi pengeluaran untuk non makan sebesar 59,01 persen. Walaupun tetap dominan namun tidak sedominan tahun-tahun sebelum pandemi yang mencapai di atas 61 persen.

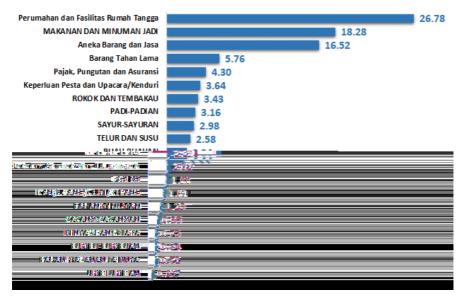
Gambar 4.10. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kuintil Pengeluaran Kabupaten Sleman Tahun 2023



Sumber: BPS, diolah

Jika penduduk diurutkan berdasarkan kelompok pengeluaran terkecil sampai kelompok pengeluaran terbesar, terlihat 60 persen penduduk (kuantil 1 - kuantil 3) memiliki pengeluaran makanan yang lebih besar dibanding pengeluaran non makanan. Sisanya penduduk dengan 40 pengeluaran terbesar memilik pengeluaran non makanan yang lebih besar. 20 persen penduduk dengan pengeluaran terbesar (kuantil 5) memiliki rata-rata pengeluaran non makanan sampai dengan Rp3.825.338 per kapita per bulan, jauh di atas pengeluaran 20 persen penduduk dengan pengeluaran terkecil (kuantil 1) yang hanya mencapai Rp265.958 per kapita per bulan. Demikian juga untuk pengeluaran makanan, ada perbedaan besaran pengeluaran yang cukup besar untuk penduduk di kuantil 5 dan kuantil 1.

Gambar 4.11. Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Kabupaten Sleman Tahun 2023

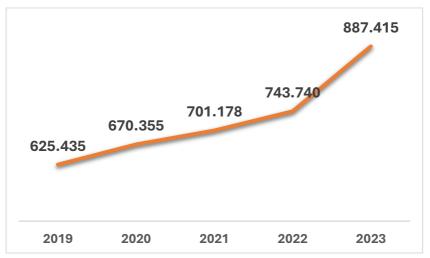


Sumber: BPS, diolah

Pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, pengeluaran makananan dan minuman jadi dan pengeluaran aneka barang dan jasa menjadi tiga besar rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2023, masing-masing sebesar 26,78 persen, 18,28 persen dan 16,52 persen.

# 4.3.1. Pola Konsumsi Kelompok Makanan

Gambar 4.12. Rata-Rata Pengeluaran Makanan Per Kapita Per Bulan Kabupaten Sleman 2019 2023

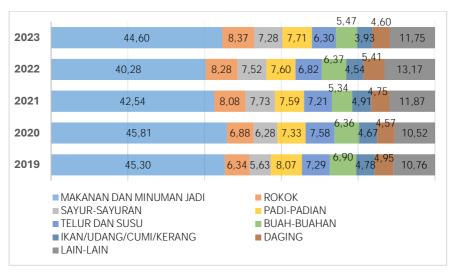


Sumber: BPS, diolah

Pengeluaran Kelompok Makanan cenderung selalu meningkat setiap tahunnya, dan mencapai rata-rata Rp 887.415 per kapita per bulan pada tahun 2023.

an makanan persen pada kuantil 4 dan J. Dari gambar tersebut dapat dilihat juga bahwa untuk proporsi pengeluaran makanan di atas 50 persen, ada pada penduduk di kuantil 1 dan 2 untuk tahun 2019-2021, dan ada pada penduduk di kuantil 1, 2, dan 3 untuk tahun 2022.

Gambar 4.14. Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Sub Kelompok Makanan Kabupaten Sleman 2019 2023

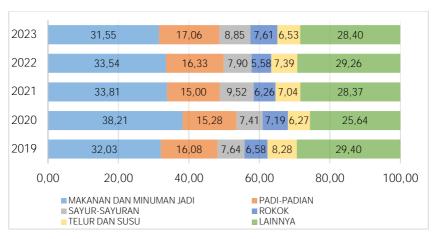


Sumber: BPS, diolah

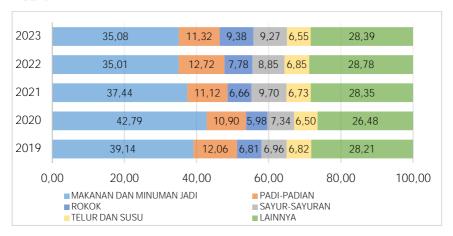
Jika dilihat menurut sub kelompoknya maka pengeluaran terbesar kelompok makanan masyarakat Kabupaten Sleman ada di sub kelompok makanan dan minuman jadi, yang mencapai 44,60 persen dari pengeluaran kelompok makanan pada tahun 2023Pengeluaran terbesar berikutnya adalah sub kelompok rokok dan tembakau, sub kelompok padi-padian, sub kelompok sayursayuran, serta sub kelompok telur dan susu. Yang perlu dicermati pada tahun 2021 sampai dengan 2023 proporsi pengeluaran sub kelompok rokok dan tembakau menjadi sub kelompok terbesar kedua mengalahkan sub kelompok padi-padian, sayur-sayuran dan telur/susu. Padahal dalam dua tahun sebelumnya sub kelompok rokok dan tembakau tidak sebesar ketiga sub kelompok tersebut.

Gambar 4.15. Persentase Pengeluaran Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Sub Kelompok Makanan Per Kuantil Kabupaten Sleman 2019 2023

## Kuantil 1



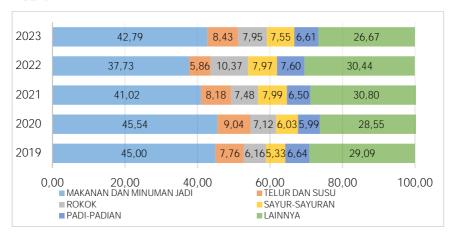
## Kuantil 2



Sumber: BPS, diolah

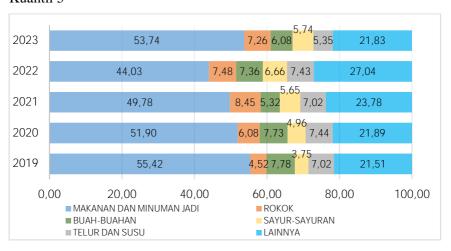
Kuantil 3

## Kuantil 4



Sumber: BPS, diolah

Kuantil 5

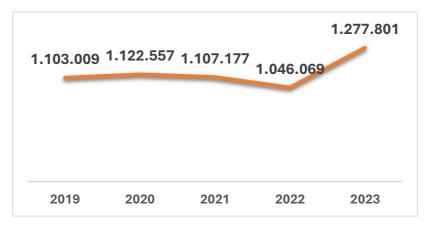


Jika dilihat per kuantil, terlihat pola yang hampir sama dari kuantil 1 sampai dengan kuantil 4, untuk pengeluaran makanan ada lima sub kelompok terbesar yang dikonsumsi, yaitu makanan dan minuman jadi, padi-padian, telur dan susu, sayur-sayuran dan rokok. Namun pada kuantil kuantil 5, ada sedikit perbedaan, yaitu adanya sub kelompok buah-buahan dalam lima besar pengeluaran makanannya dan sub kelompok padi-padian yang tidak masuk dalam lima besar pengeluaran masyarakat Kabupaten Sleman.

## 4.3.2. Pola Konsumsi Kelompok Non Makanan

Besarnya rata-rata pengeluaran kelompok non makanan masyarakat Kabupaten Sleman dari tahun 2020 - 2022 cenderung menurun dan naik tajam pada tahun 2023 menjadi Rp1.277.801

Gambar 4.16. Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Per Bulan Kabupaten Sleman 2019 2023



Pada tahun 2023, pengeluaran terbesar pada kelompok non makanan adalah sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 45,38 persen. Kemudian diikuti oleh sub kelompok aneka barang dan jasa mencapai 27,99. Sementara itu sub kelompok pakaian, alas kaki, dan tutup kepala merupakan sub kelompok dengan pengeluaran terkecil.

Gambar 4.17. Persentase Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Sub Kelompok Non Makanan Kabupaten Sleman 2019 2023

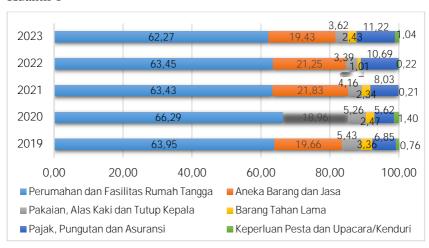


Sumber: BPS, diolah

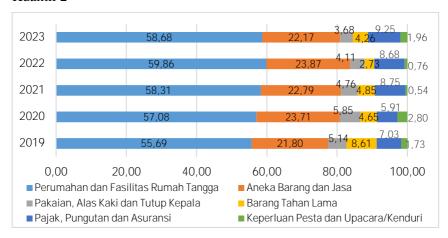
Secara proporsi hampir tidak terjadi pergeseran pengeluaran pada sub-sub kelompok non makanan pada tahun 2023, kecuali pada sub kelompok keperluan pesta dan upacara kenduri yang proporsinya naik cukup signikan dibandingg tahun sebelumnya, yaitu dari 1.40 persen pada tahun 2022 menjadi 6,16 persen pada tahun 2023. Kenaikan tersebut cukup besar dibandingkan pada masa pandemi tahun 2020-2022, bahkan dibanding sebelum masa pandemi tahun 2019.

Gambar 4.18. Persentase Pengeluaran Non Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Sub Kelompok Non Makanan Per Kuantil Kabupaten Sleman 2019 2023



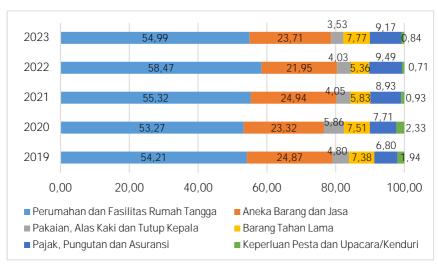


#### Kuantil 2

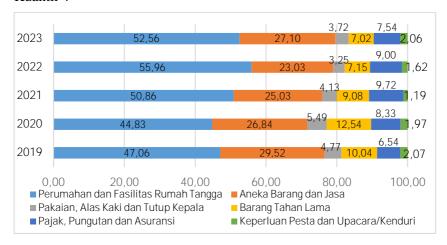


Sumber: BPS, diolah

#### Kuantil 3

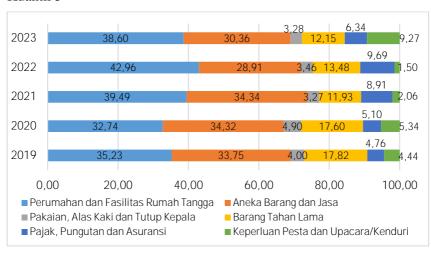


#### Kuantil 4



Sumber: BPS, diolah

## Kuantil 5



Jika dilihat per kuantil ada perbedaan pola urutan konsumsi pada kelompok non makanan di masyarakat Kabupaten Sleman. Pada kuantil 1 dan kuantil 2 pengeluaran barang tahan lama tidak terlalu menjadi prioritas atau hanya berada pada peringkat dua terkecil, atau di bawah proporsi pengeluaran sub kelompok pakaian, alas kaki dan tutup kepala. Pada kuantil 3 dan 4 proporsi sub kelompok barang tahan lebih besar dibandingkan sub kelompok pakaian, alas kaki dan tutup kepala. Pada kuantil 5 proporsi pengeluaran sub kelompok barang tahan lama semakin besar dibandingkan sub kelompok pakaian, kaki dan tutup kepala, bahkan berada urutan ke-3 pengeluaran terbesar.

Hal ini bisa berarti bahwa ada kecenderungan jika semakin besar pengeluaran masyarakat akan semakin besar proporsi pengeluaran untuk sub kelompok aneka barang dan jasa serta barang tahan lama. Lain halnya dengan proporsi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, akan semakin mengecil seiring dengan besarnya pengeluaran masyarakat di Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala tidak terlalu terjadi perbedaan proporsi yang besar untuk semua kuantil.

[Halaman ini dikosongkan]							





#### BAB V

## **PENUTUP**

- Indeks Gini Kabupaten Sleman tahun 2023 sebesar 0,433, lebih tinggi dibanding tahun 2022 atau pengeluaran penduduknya lebih tidak merata dibanding tahun 2022 dan termasuk kriteria ketimpangan moderat.
- 2. Berdasarkan kriteria Bank Dunia ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sleman termasuk sedang, dimana kelompok penduduk 40% pendapatan rendah memperoleh 15,96 persen dari total pendapatan penduduk Kabupaten Sleman. Nilai kriterian Bank Dunia tersebut termasuk tingkat ketimpangan sebaran pendapatan sedang.
- Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi D.I. Yogyakarta, garis kemiskinan di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun relatif tidak setinggi Kota Yogyakarta, namun masih di atas Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.
- 4. Jika dilihat secara jumlah, pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sleman berada di bawah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, namun masih di atas Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.
- Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi D.I Yogyakarta, nilai P<sub>1</sub> dan P<sub>2</sub> Kabupaten Sleman ternyata cukup

- rendah meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2023.
- 6. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 proporsi pengeluaran makanan masyarakat Sleman selalu meningkat. Tahun 2023 proporsi pengeluaran makanan masyarakat Sleman menurun dibanding tahun 2022, yaitu sebesar 40,99. Angka ini masih lebih tinggi jika dibanding tahun proporsi pengeluaran makanan tahun 2019 (36,18 persen).
- 7. Pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, pengeluaran makananan dan minuman jadi dan pengeluaran aneka barang dan jasa menjadi tiga besar rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sleman pada tahun 2023, masing-masing sebesar 26,78 persen, 18,28 persen dan 16,52 persen
- 8. Pada kuantil 1 sampai dengan kuantil 3, lima besar pengeluaran makanan terbesar adalah dari sub kelompok makanan dan minuman jadi, sub kelompok padi-padian, sub kelompok telur dan susu, sub kelompok sayur-sayuran, dan sub kelompok rokok, dengan variasi urutan yang berbeda setiap kuantilnya.
- 9. Pada kuantil 4 dan kuantil 5, lima besar pengeluaran makanan adalah sub kelompok makanan dan minuman jadi, sub kelompok rokok, sub kelompok telur dan susu, sub kelompok sayur-sayuran dan sub kelompok buah-buahan.
- Pengeluaran sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi prioritas utama pengeluaran non makanan pada semua kuantil di Kabupaten Sleman.
- 11. Sub kelompok barang tahan lama menjadi pembeda prioritas

pengeluaran non makananan pada masing-masing kuantil pengeluaran penduduk Kabupaten Sleman, dimana semakin besar kuantil, semakin besar proporsi pengeluaran untuk sub kelompok barang tahan lama.

12. Pola pengeluaran non makanan untuk kuantil 5 cukup berbeda dengan kuantil lainnya pada tahun 2023, yaitu meningkatnya proporsi pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara/kenduri.

